



PEMERINTAH  
KABUPATEN BULELENG



# LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2020

BAGIAN PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2021

## KATA PENGANTAR



PUTU AGUS SURADNYANA, ST  
*Bupati Buleleng*

Segala Puja dan Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa / *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugraha-Nya*, Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Adapun Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan mengingat dengan adanya Otonomi Daerah yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Ternyata semakin memperluas kewenangan daerah dalam berbagai bidang, hal ini mengakibatkan pelaksanaan kewenangan antar daerah yang satu berbeda dengan daerah yang lainnya. Kondisi tersebut menuntut Pemerintah Pusat harus tetap memperhatikan hak-hak masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sehingga untuk menjamin hal itu Pemerintah Pusat membuat kebijakan mengenai Standar Pelayanan Minimal dimana kebijakan tersebut merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan tindakan aksi daerah dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal, Salah satunya yaitu membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130 / 5 / HK / 2021 tanggal 4 Januari tahun 2021.

Semoga Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan. Dalam penyajian laporan ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan SPM ini. Akhir kata atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Singaraja, 30 Maret 2021

**Bupati Buleleng,**

**Putu Agus Suradnyana, ST**

# DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	<b>1</b>
1.2. Dasar Hukum.....	<b>2</b>
1.3. Kebijakan Umum.....	<b>3</b>
1.4. Arah Kebijakan.....	<b>4</b>
<b>BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM</b> .....	<b>5</b>
2.1. Bidang Urusan Pendidikan.....	<b>5</b>
2.2. Bidang Urusan Kesehatan.....	<b>8</b>
2.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	<b>14</b>
2.4. Bidang Urusan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.....	<b>18</b>
2.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	<b>21</b>
2.6. Bidang Urusan Sosial.....	<b>33</b>
<b>BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	<b>37</b>
3.1. Bidang Pendidikan.....	<b>37</b>
3.2. Bidang Kesehatan .....	<b>41</b>
3.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	<b>44</b>
3.4. Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan .....	<b>45</b>
3.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	<b>46</b>
3.6. Bidang sosial .....	<b>48</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>49</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dengan dilaksanakannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat dan daya saing daerah yang sejalan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Berbagai perubahan mendasar pengelolaan pemerintahan telah dilakukan termasuk penyediaan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam penyediaan dan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh setiap kementerian/lembaga. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dimana pelayanan minimal dimaksud mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Adapun laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM di daerah memberikan informasi mengenai capaian kinerja pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-283 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

11. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Ketertiban Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

### **1.3. Kebijakan Umum**

Kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintahan Daerah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dimana kebijakan umum merupakan arah kebijakan yang diambil dalam mencapai sasaran yang terukur dari masing – masing sasaran RPJMD, yaitu :

1. Meningkatkan infrastruktur pendukung pembangunan perekonomian;
2. Pemetaan potensi dan promosi investasi daerah;
3. Peningkatan penyerapan tenaga kerja;
4. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan pemerataan pendidikan di semua jenjang;
5. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan ;
6. Penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan jujur;
7. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan;
8. Meningkatkan penggalan, pengembangan dan pelestarian kesenian berbasis Budaya Bali;
9. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin;
10. Pengarus – utamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan;
11. Pengembangan pembangunan sesuai peruntukan ruang dan berwawasan lingkungan;

#### **1.4. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan adalah orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah selama satu tahun anggaran dalam penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA adalah sebagai berikut :

1. Menjamin akses perekonomian masyarakat;
2. Menjamin keamanan dan ketertiban berinvestasi;
3. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja agar mempunyai daya saing;
4. Percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan sembilan tahun yang merata dan bermutu;
5. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan;
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan penerapan serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Peningkatan peran serta pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan dengan mengedepankan komunikasi, koordinasi dan keterbukaan;
8. Menumbuhkembangkan suasana kebebasan berkreasi dibidang seni dan budaya;
9. Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial;
10. Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam berbagai aktivitas pembangunan;
11. Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

## BAB. II

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

#### 2.1. Bidang Urusan Pendidikan.

##### 1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

##### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Buleleng secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas dalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah. Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. Pendidikan dasar;
- b. Pendidikan kesetaraan;
- c. Pendidikan anak usia dini.

##### 2. Target Capaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Tahun	Pembianyaan
1	1. Pendidikan Dasar	jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	2020	Rp. 155.035.344.619,23
2	2. Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	2020	Rp. 1.250.613.000
3	3. Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	2020	Rp. 10.459.639.000



### 3 . Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian	Tahun
1	1. Pendidikan Dasar	jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	104,42%	2020
2	2. Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	2020
3	3. Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	36,89%	2020

### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran	Realisasi	Sumber Dana		%
		APBN	APBD	
Rp.166.745.596.619,23	Rp.163.772.436.773,89	RP. 67.691.081.727	Rp.41.422.711.915	98.22%

### 5. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

Nomor	Pegawai	Jumlah	Fungsional Umum	Pejabat	Ket
1	PNS	70	44	25	
2	Kontrak	75	72	-	

Guru dan Tendik

No	Kecamatan	SD	SMP	PAUD	PKBM
1	Banjar	583	289	80	7
2	Buleleng	1.027	663	289	9
3	Busungbiu	399	155	44	-
4	Gerokgak	451	258	64	5
5	Kubutambahan	483	248	51	-
6	Sawan	494	231	61	4
7	Seririt	524	213	91	2
8	Sukasada	624	220	99	-
9	Tejakula	398	193	44	-
<b>TOTAL</b>		<b>4.983</b>	<b>2.470</b>	<b>823</b>	<b>27</b>

## 6. Permasalahan dan Solusi

Dari sejumlah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan masih memiliki permasalahan dan kelemahan sebagai berikut:

### 1. Permasalahan I

Kebutuhan akan tenaga pendidik di satuan pendidikan yang berstatus PNS sangat kurang, hal ini menjadi prioritas. Jumlah PNS semakin berkurang, tidak berimbang antara PNS yang direkrut dengan jumlah PNS pensiun.

### 2. Permasalahan II

Rendahnya partisipasi anak usia dini yang bersekolah di jenjang Paud, karena secara regulasi tidak ada aturan yang mewajibkan usia 4-6 tahun menempuh pendidikan formal. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Buleleng menerbitkan Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2020

## **2.2. Bidang Urusan Kesehatan**

Penerapan dan Pelaksanaan SPM Bidang kesehatan di kabupaten Buleleng mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Sejak diberlakukannya Permenkes ini pada tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng telah melaksanakan indikator-indikator SPM Bidang Kesehatan dan melaporkan perkembangan pencapaian target setiap tahunnya ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi secara *online* melalui aplikasi Komunikasi Data Kementerian Kesehatan.

### **A. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam SPM Bidang Kesehatan. Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yang berisi 12 jenis pelayanan dasar. Penerapan dan Pelaksanaan SPM Bidang kesehatan di kabupaten Buleleng mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Kesehatan terdiri dari :

1. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar;
2. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
3. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
4. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
5. Setiap anak pada usia 8 indicator 8 dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
6. Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
7. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
8. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
9. Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;

10. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
11. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar; dan
12. Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan 9ndicat pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

Kebijakan Dinas Kesehatan Kab.Bulleng, terkait percepatan pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan :

1. Mengintegrasikan indikator-indikator SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2017-2022 dan RKA dan DPA Tahun 2020, dan Renja Tahun 2020
2. Mengoptimalkan Bantuan Operasional Kesehatan (APBN) untuk biaya operasional Puskesmas dalam pencapaian indikator-indikator SPM.

## **B. Target Pencapaian SPM**

Selanjutnya menyiapkan database sesuai indikator SPM. Indikator-indikator SPM diidentifikasi dan di distribusikan pada bidang yang menangani program dan kegiatan yang sesuai 12 indikator SPM.

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan :

**Tabel 1. Indikator SPM**

	Jenis Pelayanan Dasar	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	2020
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	2020
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	2020
4	Pelayanan kesehatan balita	100	2020
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	2020
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	2020
7	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	100	2020
8	Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus.	100	2020
9	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.	100	2020

10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.	100	2020
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB.	100	2020
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.	100	2020

### C. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Buleleng tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020**

No.	INDIKATOR	Sasaran	Target (%)	Realisasi Sasaran	% Capaian
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL				
	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	10.146	100	10.865	107,09
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN				
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	9.683	100	10.948	113,06
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR				
	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	9.241	100	10.865	117,57
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA				
	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapaka	38.064	100	32.987	86,66
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR				
	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	104.457	100	117.938	112,91
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF				
	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	364.527	100	138.801	38,08
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT				
	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	69.810	100	72.779	104,25
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI				
	Jumlah penderita hipertensi usia $\geq$ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	122.524	100	18.794	15,34

9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM)				
	Jumlah penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6.849	100	6.600	96,36
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT				
	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1.122	100	1.429	127,36
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS				
	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	4.250	100	2.391	56,26
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV				
	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	12.002	100	9.237	76,83

Sumber Data : Laporan SPM Dinas Kesehatan Tahun 2020

## 1.2 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2020 di Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Buleleng berjumlah Rp. 12.002.224.800,99 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) APBD Kabupaten Buleleng : Rp. 2.055.530.056,00
- 2) Dana Kapitasi JKN dan BOK : Rp. 8.460.684.744,99
- 3) APBN (Jampersal) : Rp. 1.486.010.000,00

## 1.3 Dukungan Personil

Jumlah pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan Puskesmas tahun 2020 sebanyak 862 orang. PNS sebanyak 812 Orang dan CPNS 50 Orang. Adapun rincian berdasarkan pendidikan formal sebagai berikut :

- a) S 2 : 15 Orang
- b) S 1 : 217 Orang
- c) D4 : 25 Orang
- d) D3 : 459 Orang
- e) D2 : 2 Orang
- f) D1 : 4 Orang

- g) SLTA, SMF, SMAK, SPRG, SPK : 132 Orang
- h) SLTP : 5 Orang
- i) SD : 3 Orang

## **1.4 Permasalahan dan Solusi**

### **1.4.1 Permasalahan**

- 1) Belum adanya Perda/Perbup yang mengatur tentang petunjuk teknis penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
- 2) Masih kurangnya pemahaman pemegang program kesehatan baik di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas terkait dengan definisi operasional dari indikator dan data yang diperlukan dalam pencapaian indikator.
- 3) Estimasi jumlah sasaran yang terlalu tinggi karena menggunakan data Riskesdas tahun 2013 sehingga tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya
- 4) Pelayanan Kesehatan Balita capaiannya dibawah target 100% yaitu 86,7 %. Dalam Pelayanan kesehatan balita terdapat 3 indikator dalam pelayanan yaitu pemberian vitamin 2 kali, pemantauan pertumbuhan 8 kali, pemantauan perkembangan 2 kali, apabila salah satu indikator tidak terpenuhi maka dianggap tidak mendapatkan pelayanan balita. Tidak tercapainya target 100% dikarenakan tidak berjalannya kegiatan posyandu dari bulan maret akibat adanya pandemi dan dibatasinya kegiatan kunjungan rumah sehingga sasaran balita yang terlayani mengalami penurunan.
- 5) Pelayanan Kesehatan Usia Produktif tidak mencapai target 100 %, dimana capaiannya hanya sebesar 38,1%. Hal ini disebabkan karena uk kegiatan skrining penduduk usia produktif dilaksanakan pada saat kegiatan Posbindu PTM, sedangkan dalam kondisi pandemi kegiatan melibatkan masyarakat dibatasi.
- 6) Indikator SPM Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi hanya mencapai 15,3% dan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus (96,4%). Hal ini disebabkan karena Menurunnya kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan akibat adanya pandemic covid-19. Selain itu pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus

(DM) dilakukan pada saat pelaksanaan Posbindu PTM dimana pelaksanaan tidak maksimal mengingat masih dalam kondisi pandemi dan memperhatikan kasus covid-19 di wilayah masing-masing puskesmas.

Selain itu yang ditangani adalah masyarakat yg berisiko tinggi dan sudah menjadi penyandang PTM yg merupakan kormobid dari covid-19, sehingga perlu kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

- 7) Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis hanya mencapai 56,3%. Hal ini disebabkan karena menurunnya kunjungan pasien ke fasyankes akibat adanya pandemi covid-19. Selain menurunnya kunjungan juga disebabkan karena kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat dibatasi akibat pandemi sehingga kegiatan lapangan menurun
- 8) Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko terinfeksi HIV capaiannya 76,8%. Hal ini disebabkan factor-faktor sebagai berikut :
  - a. Ada beberapa sasaran ibu hamil yang belum mau melakukan pemeriksaan tes HIV
  - b. Untuk populasi kunci pasien TB target yang diberikan dari pusat terlalu tinggi dengan upaya penyisiran kasus under reporting pun penemuan masih jauh dari target sehingga belum mencapai 100% dan ada beberapa pasien TB yang tidak mau dilakukan tes HIV.
  - c. Data penemuan LSL disesuaikan dengan jumlah riil ditemukan dan telah diperiksa di semua layanan tetapi tidak dapat mencapai jumlah sasaran yang ditentukan.

#### **1.4.2 Solusi**

- 1) Menyusun Perda/Perbup yang mengatur tentang petunjuk teknis penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.
- 2) Melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman definisi operasional (DO) dan melakukan skrining ke sasaran lebih di tingkatkan. Kegiatan lebih banyak didanai oleh bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang bersumber dari APBN. Pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.



### 2.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SPM Pekerjaan Umum sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29 / PRT / M / 2018 terdiri dari :

#### 1. JENIS PELAYANAN DASAR

Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum yang terdiri dari jenis pelayanan dasar yaitu :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

#### 2. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

- a. Dalam Permendagri 100 Tahun 2018 ditetapkan Target SPM Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Setiap Tahun

- b. Dalam RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 target yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase layanan air minum perpipaan kabupaten	90%	2020

#### 3. REALISASI

##### a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Buleleng ditangani oleh **Sistem PDAM** dan **Sistem Swakelola Masyarakat** dalam bentuk

lembaga Unit Pengelola Sarana atau Kelompok Pengelola Sarana (UPS/KPS) di tingkat desa/kelompok. Dari jumlah 148 desa/kelurahan, 67 desa/kelurahan sudah mendapat pelayanan air bersih PDAM dan sisanya 81 desa melalui UPS/KPS ditingkat desa/kelompok ada sekitar 25 Desa/Kelurahan disamping dilayani oleh PDAM juga dilayani melalui UPS/KPS.

Layanan air minum di Kabupaten Buleleng dikelola oleh PDAM Kabupaten Buleleng, yaitu : PDAM Kabupaten Buleleng, Cabang Celukan Bawang, Cabang Seririt, Unit Sambirenteng, Cabang Air Sanih, Cabang Busungbiu, Cabang Pancasari. Rendahnya cakupan pelayanan PDAM Buleleng diakibatkan karena faktor topografi wilayah yang berbukit dan permukiman penduduk yang menyebar membuat PDAM Buleleng belum mampu menjangkau seluruh desa di Kabupaten Buleleng.

Persentase pelayanan air minum perpipaan di Kabupaten Buleleng telah mengalami peningkatan, yang sebelumnya pelayanan air minum perpipaan tahun 2020 di Kabupaten Buleleng mencapai 176.805 KK

The screenshot shows a web application interface for Kabupaten Buleleng. The page title is 'KABUPATEN BULELENG'. The main content area is a form for 'Perpipaan' (Water Supply). The form includes a table with the following data:

Perpipaan				
2. Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0	0.00 %
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik				
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik				
• Jumlah yang Harus Dilayani :				
	<i>Jumlah total yang harus dilayani</i> 201.932	<i>Jumlah total yang Terlayani</i> 188.300	13.632	
	Jumlah Rumah Tangga yang harus dilayani (1)	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani (2)	Jumlah Rumah Tangga yang belum terlayani (3)	Persentase capaian mutu (4)
1. SPALD-S <25 Jiwa/Ha	<input type="text" value="201.932"/>	<input type="text" value="188.300"/>	13.632	93.25 %
2. SPALD-S >25 Jiwa/Ha	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0	0.00 %
3. SPALD-T	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0	0.00 %

At the bottom of the form, there is a green 'Simpan' button.

menjadi 209.262 KK (86,12%) dari jumlah keseluruhan 242.989 KK pada tahun 2020

### Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016,

Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, mulai tahun anggaran 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng mendapatkan tambahan kewenangan yaitu **Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten**, dengan capaian tahun 2020 sebanyak 188.300 KK (93,25%) terlayani dari 201.932 Rumah tangga di kabupaten buleleng.

#### 4. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk pencapaian SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2020 bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng yang terdiri sumber DAK dan Non DAK kecuali untuk DAK Air Minum yang mendapat refocusing anggaran sehingga Tahun 2020 Sektor Air Minum tidak mendapatkan pembiayaan dari DAK seperti tabel dibawah :

No	Sektor	Jumlah (Rp)	DAK Air Minum (Rp)	DAK Sanitasi (Rp)	Non DAK (Rp)
1	Air Minum	978.415.075,00			978.415.075,00
2	Sanitasi	2.783.061.000,00		2.500.000.000,00	283.061.000,00

Pelayanan Air Bersih	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(PDAM+ PAM Desa)	KK	126.188	168.912	172.154	176.805	209.262
	%	78,58	82,97	84,15	86,12	86,12

#### 5. DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah personil yang menangani urusan air minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah :

No	Jabatan	Kwalifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Bidang	S2	1	PNS
2	Kepala Seksi	S1	2	PNS
3	Staf	SMK	2	PNS
4	Staf	SMK	2	Non PNS
5	Staf	Sarjana Teknik	3	Non PNS

## **6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

### **a. Permasalahan :**

- Masih terdapat desa-desa rawan air minum di kabupaten Buleleng yang belum mendapatkan pelayanan.
- Besarnya biaya operasional terutama pada layanan air minum yang sumbernya menggunakan sumur bor.
- Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki jamban yang sesuai dengan standar kesehatan.

### **b. Solusi :**

- Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat baik dengan Kementerian Pekerjaan Umum maupun Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal pembiayaan proyek dan operasional pemeliharaan terutama dalam pembiayaan solarcell.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas hidup terutama akan ketersediaan air bersih terlindungi dan pola hidup bersih dan sehat.

## 2.4 Bidang Urusan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

### A. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dalam SPM perumahan rakyat oleh Pemerintah Kabupaten sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Nomor 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar, yaitu :

- a) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Perhitungan Capaian

Capaian SPM = Jumlah unit rumah korban bencana

$$\frac{\text{yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

- (a) Pembilang Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
  - (b) Penyebut Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
  - (c) Ukuran/ Konstanta Persen (%)
- b) Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:
    - 1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

- 2) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni;
- 3) Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam.
- 4) Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m<sup>2</sup> dan luas tanah minimal 60 m<sup>2</sup>.
- 5) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

#### B. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian oleh Pemerintahan kabupaten Buleleng dalam mencapai SPM tahun 2020 adalah sebanyak 82 unit dengan rincian sebagai berikut :

No.	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020					
	JENIS KEGIATAN		SATUAN	VOLUME	SUMBER DANA	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendampingan dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	<b>Lokasi</b>	<b>Unit</b>	<b>82</b>	<b>APBD</b>	<b>650.000.000</b>
		<b>Kec. Seririt</b>	<b>Unit</b>	<b>31</b>		<b>222.200.000</b>
		1. Desa Pangkung Paruk		9		63.200.000
		2. Desa Banjarasem		22		159.000.000
		<b>Kec. Kubutambahan</b>	<b>Unit</b>	<b>2</b>		<b>16.000.000</b>
		1. Desa Tamblang		2		16.000.000
		<b>Kecamatan Grokgak</b>	<b>Unit</b>	<b>22</b>		<b>193.600.000</b>
		1. Desa Tukadsumaga		11		84.700.000
		2. Desa Sanggalangit				
		<b>Kecamatan Sukasada</b>	<b>Unit</b>	<b>15</b>		<b>111.000.000</b>
		1. Desa Silangjana		15		111.000.000
		<b>Kecamatan Banjar</b>	<b>Unit</b>	<b>12</b>		<b>107.200.000</b>
		1. Desa Tampekan		3		29.700.000
		2. Desa Banjar		9		77.500.000

### C. Realisasi

Realisasi SPM oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2020 adalah 0 % dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat adanya pandemi Covid-19 pada bulan Maret 2020.

Capaian SPM =  $\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100$

Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n

$$= \frac{0}{82} \times 100 \%$$

82

$$= 0 \%$$

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah belanja tidak langsung pada DPA Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2020 dengan alokasi Rp. 650.000.000,-. Namun karena adanya refocusing anggaran terkait covid-19 maka anggaran menjadi Rp. 0,-

Adapun untuk biaya operasional nya terdapat pada DPA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2020 dengan alokasi Rp. 141.681.800,-

#### 5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM adalah 6 personil dengan rincian 2 PNS dan 4 Non PNS.

#### 6. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah akibat bencana alam tidak terlepas dari permasalahan dan kendala. Permasalahan dan kendala tersebut secara umum disebabkan oleh faktor teknis adanya refocusing anggaran akibat adanya pandemi Covid-19 pada bulan Maret 2020.

Adapun solusi yang dapat diambil yaitu penyusunan proposal permohonan rehabilitasi rumah korban bencana yang akan digunakan sebagai perencanaan untuk tahun 2021.

## 2.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

### 2.1 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

#### 2.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

- Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

#### 2.1.2 Target Pencapaian SPM oleh daerah

- Meningkatkan Kapasitas Linmas Desa/Kelurahan di setiap Kecamatan

Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Indikator
2018	2019	2020	2021	2022	Sasaran
558 org	558 org	558 org	558 org	558 org	Jumlah linmas
Pembiayaan Rp.266.631.400	Pembiayaan Rp.236.132.500	Pembiayaan Rp.73.487.100	Pembiayaan -	Pembiayaan -	desa/kelurahan yang aktif pada setiap kecamatan

- Meningkatnya Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah

Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Indikator
2018	2019	2020	2021	2022	Sasaran
100%	100%	100%	100%	100%	Prosentase pelanggaran
Pembiayaan Rp.321.508.000	Pembiayaan Rp. 311.300.000	Pembiayaan Rp.252.150.450	Pembiayaan -	Pembiayaan -	Perda/Perkada

- Meningkatnya Ketertiban Umum di Masyarakat

Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Indikator
2018	2019	2020	2021	2022	Sasaran
100%	100%	100%	100%	100%	Prosentase Pengamanan Ketertiban Umum di Masyarakat
Pembiayaan Rp. 763.689.200	Pembiayaan Rp. 570.871.700	Pembiayaan Rp.866.001.700	Pembiayaan -	Pembiayaan -	

#### 2.1.3 Realisasi Anggaran Tahun 2020



- ✓ Jumlah linmas tingkat desa/ kelurahan yang aktif pada setiap kecamatan yang berkompeten
  - Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
  - Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan :
    - Alokasi Anggaran : Rp. 73.487.100
    - Realisasi : Rp. 73.487.100
    - Permasalahan dan Solusi : Situasi Pandemi Covid-19 dan Sarana Prasarana yang tidak memadai
- ✓ Prosentase Penurunan Pelanggaran Perda / Perkada
  - Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
  - Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah
    - Alokasi Anggaran : Rp. 252.150.450
    - Realisasi : Rp. 248.374.450
    - Permasalahan dan Solusi : Situasi Pandemi Covid-19 dan Sarana Prasarana yang tidak memadai
- ✓ Prosentase Pengamanan Ketertiban Umum di Masyarakat
  - Program Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan
  - Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja
    - Alokasi Anggaran : Rp. 866.001.700
    - Realisasi : Rp. 856.133.900
    - Permasalahan dan Solusi : Situasi Pandemi Covid-19 dan Sarana Prasarana yang tidak memadai

#### 2.1.4 Kesimpulan

- ✓ Sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal merupakan Sub Urusan Pelayanan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten.
- ✓ Adapun arah kebijakan SPM pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng mencakup Pelayanan Perlindungan Masyarakat, Pelayanan

Penegakan Peraturan Daerah/Perkada serta Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai SOP yang berlaku.

- ✓ Target pencapaian SPM oleh Daerah di Bidang Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat mengacu pada Peningkatan Kapasitas Linmas Desa/Kelurahan sudah mencapai 100% dengan pembiayaan Rp.73.487.100, Peningkatan Prosentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada sudah mencapai 100% dengan pembiayaan Rp.252.150.450 dan Peningkatan Prosentase Pengamanan Ketertiban Umum di masyarakat sudah mencapai 100 % dengan pembiayaan Rp. 866.001.700.

#### 2.1.5 Saran

Diusahakan ada Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk Meningkatkan Volume Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga masukan, proses, keluaran, hasil dan manfaat pelayanan dasar tercapai secara optimal

### TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### TRANTIBUM LINMAS KABUPATEN BULELENG

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Volume Pencapaian
1.	Pelayanan Peningkatan Kapasitas Linmas Desa/Kelurahan	Jumlah Aparatur Satuan Linmas Desa/Kelurahan yang mendapat pelatihan - Jumlah linmas Desa/Kelurahan yang belum mendapat pelatihan	62 org	1 Januari s/d 31 Desember 2020
2	Pelayanan Penurunan Pelanggaran Perda / Perkada	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perda Tahun lalu}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Tahun ini}} \times 100\%$	80 %	1 Januari s/d 31 Desember 2020
3	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	$\frac{\text{Jumlah Patroli Dalam Sehari}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100\%$	85 %	1 Januari s/d 31 Desember 2020

## A. Jenis Pelayanan Dasar

- Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran.
- Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah Managemen Kebakaran (WMK)

## B. Target Pencapaian SPM oleh daerah

- Meningkatkan kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Indikator Sasaran
2018	2019	2020	2021	2022	
100%	100%	100%	100%	100%	Persentase Cakupan Bencana Kebakaran
Pembiayaan	Pembiayaan	Pembiayaan	Pembiayaan	Pembiayaan	
Rp. 547.871.750	Rp. 510.977.300	Rp.570,864,800	-	-	

- Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penyelamatan Bencana Kebakaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Indikator Sasaran
2018	2019	2020	2021	2022	
100%	100%	100%	100%	100%	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Layanan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)
Pembiayaan	Pembiayaan	Pembiayaan	Pembiayaan	Pembiayaan	
Rp.2.108.717.800	Rp.2.054.880.100	Rp.2.134.060.100	-	-	

## C. Realisasi Anggaran Tahun 2020

- ✓ Persentase Cakupan Bencana Kebakaran
  - Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran :
    - Alokasi Anggaran : Rp. 18.650.000
    - Realisasi : Rp. 16.947.760

- Dukungan Personil : 4 Person
  - Permasalahan dan Solusi : Sisanya/silva dibawah harga penawaran
- Program Pencegahan Kebakaran :
- Alokasi Anggaran : Rp. 552.214.800
  - Realisasi : Rp. 538.169.950
  - Dukungan Personil : 4 Personil
  - Permasalahan dan Solusi : Sisanya/silva dibawah harga Penawaran
- ✓ Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Layanan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)
- Program Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran
- Alokasi Anggaran : Rp. 2.134.060.100
  - Realisasi : Rp. 2.114.464.273
  - Dukungan Personil : 122 Personil
  - Permasalahan dan Solusi : Adanya silva (sisa uang) sebanyak Rp. 19.595.827 dari Belanja Jasa Tenaga Kerja tidak terealisasi terkait adanya Pasukan Pemadam Kebakaran sebanyak 1 orang meninggaldunia

## 2.2 Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal

### TRANTIBUMLINMAS KABUPATEN BULELENG

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	<p>Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban dan terdampak Kebakaran di Kabupaten tahun 2020.</p> <p>Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.</p> $\frac{\text{---}}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran}} \times 100\%$	100%	1 Januari s/d 31 Desember 2020

No	Tujuan	Indikator	Program	Sasaran Program	Pagu (RP)
1. RUMUS	Terwujudnya Pencegahan dan Pelayanan Penanggulangan serta Penyelamatan Bencana Kebakaran yang Berkualitas.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Desa/Kelurahan yang siaga Bencana	18.650.000
			Pencegahan Bahaya Kebakaran		Kebakaran
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Layanan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)	Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan dan Penyelamatan Bencana Kebakaran yang Berkualitas	2.134.060.100

Jumlah Layanan Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun 2019 dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng

$$= \frac{\text{Jumlah Layanan Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun 2019}}{\text{Jumlah Kejadian di Kabupaten Buleleng}} \times 100\%$$

Jumlah Kejadian di Kabupaten Buleleng

$$= \frac{0}{133} \times 100\%$$

133

$$= 0\%$$

## A. Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

#### ➤ PraBencana

Tahap Pencegahan dan Mitigasi, Strategi yang ditempuh dengan mengupayakan penanganan preventif agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan apabila terjadi bencana.

#### ➤ Saat Terjadi Bencana.

Tahap Tanggap Darurat, Dilakukan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi serta pemberian bantuan darurat berupa tempat penampungan sementara, bantuan pangan dan penanganan medis bagi korbanbencana.

➤ PascaBencana.

Tahap Rehabilitasi Dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta memberdayakan dan mengembalikan harkat hidup terhadap korban bencana secaramanusiaawi.

### 1. Target Pencapaian SPM

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Kerja	Indikator	Target
1	2	3	5
1	- Terwujudnya Penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	Persentase Desa/Kel yang tanggap dan tangguh bencana	1 Desa
	- Meningkatnya Kesiapsiagaan bencana Desa/Kel yang sesuai ketentuan	Persentase Peningkatan Desa/kel yang siap siaga bencana sesuai ketentuan	1 Desa
	- Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang sesuai standar	Persentase penanganan kedaruratan bencana yang sesuai standar	100%
	- Terwujudnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi fasilitas umum pasca bencana yang sesuai dengan ketentuan	Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi fasilitas umum pasca benca sesuai dengan ketentuan	3 Lokasi
2	- Terwujudnya mitigasi Daerah Bencana sesuai dengan ketentuan	Persentase mitigasi Daerah Rawan Bencana	100%
	- Meningkatnya Kapasitas masyarakat terhadap ancaman bencana	Persentase desa/kel yang tanggap dan tangguh bencana	30 Peserta
3	- Meningkatnya sarana prasarana penanganan bencana yang memadai	Persentase sarana prasarana penanganan bencana yang memadai	100%
	- Terwujudnya logistik korban bencana yang layak	Persentase korban bencana yang menerima logistik	150 Paket
	- Terwujudnya penanganan korban bencana dengan instansi/lembaga terkait	Persentase Kerjasama penanganan korban bencana dengan instansi/lembaga terkait	100%
4	- Terwujudnya pemulihan fisik pasca bencana	- Persentase stimulasi bantuan pasca bencana  - Persentase fasilitasi bantuan pasca bencana	3 Lokasi
	- Terwujudnya pemiulihan psikologis pasca bencana	Persentase kerjasama pemulihan psikologis pasca bencana	2 Kali

### 3. REALISASI

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Kerja	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	- Terwujudnya Penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	Persentase Desa/Kel yang tanggap dan tangguh bencana	1 Desa	1 Desa
	- Meningkatnya Kesiapsiagaan bencana Desa/Kel yang sesuai ketentuan	Persentase Peningkatan Desa/kel yang siap siaga bencana sesuai ketentuan	1 Desa	1 Desa
	- Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang sesuai standar	Persentase penanganan kedaruratan bencana yang sesuai standar	100%	100%
	- Terwujudnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi fasilitas umum pasca bencana yang sesuai dengan ketentuan	Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi fasilitas umum pasca benca sesuai dengan ketentuan	3 Lokasi	3 Lokasi
2	- Terwujudnya mitigasi Daerah Bencana sesuai dengan ketentuan	Persentase mitigasi Daerah Rawan Bencana	100%	100%
	- Meningkatnya Kapasitas masyarakat terhadap ancaman bencana	Persentase desa/kel yang tanggap dan tangguh bencana	30 Peserta	30 Peserta
3	- Meningkatnya sarana prasarana penanganan bencana yang memadai	Persentase sarana prasarana penanganan bencana yang memadai	100%	100%
	- Terwujudnya logistik korban bencana yang layak	Persentase korban bencana yang menerima logistik	150 Paket	150 Paket
	- Terwujudnya penanganan korban bencana dengan instansi/lembaga terkait	Persentase Kerjasama penanganan korban bencana dengan instansi/lembaga terkait	100%	100%
4	- Terwujudnya pemulihan fisik pasca bencana	- Persentase stimulasi bantuan pasca bencana	3 Lokasi	3 Lokasi
	- Terwujudnya pemiulhan psikologis pasca bencana	- Persentase fasilitasi bantuan pasca bencana Persentase kerjasama pemulihan psikologis pasca bencana	2 Kali	2 Kali



## 7. ALOKASI ANGGARAN

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	- Terwujudnya Penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	Persentase Desa/Kel yang tanggap dan tangguh bencana	199,668,850
	- Meningkatnya Kesiapsiagaan bencana Desa/Kel yang sesuai ketentuan	Persentase Peningkatan Desa/kel yang siap siaga bencana sesuai ketentuan	199,668,850
	- Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang sesuai standar	Persentase penanganan kedaruratan bencana yang sesuai standar	276,450,253
	- Terwujudnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi fasilitas umum pasca bencana yang sesuai dengan ketentuan	Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi fasilitas umum pasca benca sesuai dengan ketentuan	391,787,397
2	- Terwujudnya mitigasi Daerah Bencana sesuai dengan ketentuan	Persentase mitigasi Daerah Rawan Bencana	168,914,350
	- Meningkatnya Kapasitas masyarakat terhadap ancaman bencana	Persentase desa/kel yang tanggap dan tangguh bencana	199,668,850
3	- Meningkatnya sarana prasarana penanganan bencana yang memadai	Persentase sarana prasarana penanganan bencana yang memadai	147,715,200
	- Terwujudnya logistik korban bencana yang layak	Persentase korban bencana yang menerima logistik	358,863,800
	- Terwujudnya penanganan korban bencana dengan instansi/lembaga terkait	Persentase Kerjasama penanganan korban bencana dengan instansi/lembaga terkait	22,676,600
4	- Terwujudnya pemulihan fisik pasca bencana	- Persentase stimulasi bantuan pasca bencana - Persentase fasilitasi bantuan pasca bencana	391,787,397
	- Terwujudnya pemiulihan psikologis pasca bencana	Persentase kerjasama pemulihan psikologis pasca bencana	22,676,600

## 1. DUKUNGAN PERSONIL

No	Uraian	Jumlah
1	<b>Jumlah Pegawai</b>	
	PNS	29
	Pegawai Harian /Kontrak	48
2	<b>Pangkat dan Golongan</b>	
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	Pembina Tk.I (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	2
	Penata Tk. I (III/d)	7
	Penata (III/c)	2
	Penata Muda Tk.I (III/b)	2
	Penata Muda (III/a)	3
	Pengatur Tk.I (II/d)	6
	Pengatur (II/c)	4
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-
	Juru (I/d)	1
3.	<b>Tingkat Pendidikan</b>	
	S3	-
	S2	4
	S1/D4	9
	D3	1
	D2	-
	SMA/SMK/MTs	14
	SMP/MI	1
	SD	-
4.	<b>Jumlah Pejabat</b>	
	<b>Pejabat Struktural :</b>	
	Eselon IIa	-
	Eselon IIb	
	Eselon IIIa	1
	Eselon IIIb	3
	Eselon IVa	7
	Eselon IVb	-
5.	<b>Pejabat Fungsional</b>	

## 6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam rangka mewujudkan SPM yang baik dan memadai tentunya ada permasalahan yang ditemui yaitu :

1. Anggaran yang kurang memadai
2. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai baik dari segi keahlian teknis maupun dari segi jumlah
3. Fasilitas peralatan kebencanaan yang kurang memadai

Dan sebagai solusinya kami mengambil langkah-langkah seperti :

1. Mengajukan usulan kebutuhan anggaran ke Pemerintah Pusat atau ke pemerintah Daerah
2. Mengikuti Bimtek untuk meningkatkan SDM pegawai BPBD
3. Mengajukan usulan permohonan bantuan peralatan terutama peralatan kebencanaan ke Pemerintah Pusat

## PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana.

Kami menyadari bahwa penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan yang akan datang. Demikian Standar Pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng ini kami susun secara Objektif semoga dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

## **2.6 Bidang Urusan Sosial**

Penerapan dan Pelaksanaan SPM Bidang Sosial di kabupaten Buleleng sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah - masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

### **A. Jenis Pelayanan dasar**

SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh kementerian sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota .

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 ( lima ) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di luar panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota .

### **B. Target Pencapaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Buleleng**

Target pencapaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Buleleng pada Tahun 2020, tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

## Target Pencapaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

**C. Realisasi**

Nilai rata - rata capaian SPM bidang urusan sosial Kabupaten Buleleng tahun 2020 adalah 95,65% dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel ini:

Tabel 2.2

## Realisasi SPM Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Kota		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	<p><b>Sasaran:</b> Terpenuhiya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti</p> <p><b>Indikator :</b></p> <p>Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhiya kebutuhan dasarnya di luar panti</p>	2020	100	78,26	78,26
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	<p><b>Sasaran:</b> Terpenuhiya kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti</p> <p><b>Indikator :</b></p> <p>Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhiya kebutuhan dasarnya di luar panti</p>	2020	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	<p><b>Sasaran:</b> Terpenuhiya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti</p> <p><b>Indikator :</b></p> <p>Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhiya kebutuhan dasarnya di luar panti</p>	2020	100	100	100
4.	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti	<p><b>Sasaran:</b> Terpenuhiya kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis di luar panti</p> <p><b>Indikator :</b></p> <p>Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhiya kebutuhan dasarnya di luar panti</p>	2020	100	100	100
5.	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	<p><b>Sasaran:</b> Terpenuhiya kebutuhan dasar korban bencana dan sosial daerah Kabupaten/Kota.</p> <p><b>Indikator :</b></p> <p>Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhiya kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota</p>	2020	100	100	100

#### D. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

Tabel 2.3

Alokasi Anggaran yang mendukung pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial

NO.	JENIS BELANJA	JUMLAH ANGGARAN
1.	APBD	1.000.114.000
2.	APBN	
	- BPNT	97.980.000.000
	- PKH	105.350.268.000
	- ASPDB	662.000.000

#### E. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM :

- a. PNS = 27 Orang
- b. Non PNS = 104 Orang

#### F. Permasalahan dan solusi

Permasalahan :

- Belum semua penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ) dapat tertangani;
- Terkait hal - hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal

Solusi :

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait , lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS;
- Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana prasarana pelayanan dalam penanganan PMK

## BAB. III Program dan Kegiatan

### 3.1 Bidang Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	DANA	REALISASI				KET.	
				KEUANGAN		FISIK (Keluaran)	TOT Klir KEG	SUMBER DANA	
				Rp.	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Program Pendidikan Non Formal	1	Pengembangan pendidikan keaksaraan	41.704.000	41.704.000	100,00%	100,00%	100,00%	BHP Prov BBNKB,DAU, DID-Bidang Pendidikan,
		2	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	1.025.809.000	963.448.647	93,92%	100,00%	96,96%	DAU, DAK Bidang Pendidikan-SKB,DID-Bidang Pendidikan, PAD,
		3	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	39.500.000	33.778.900	85,52%	100,00%	92,76%	BHP Prov BBNKB,DAK BOP Pendidikan Kesetaraan,
		4	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	143.600.000	126.395.808	88,02%	100,00%	94,01%	BHP Prov PKB, DAK BOP Pendidikan Kesetaraan,
<b>% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Kegiatan</b>				<b>1.250.613.000</b>	<b>1.165.327.355</b>	<b>93,18%</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,93%</b>	
2	Program Peningkatan Akseibilitas dan Kualitas PAUD	5	Penambahan ruang kelas sekolah	848.877.172	848.877.172	100,00%	100,00%	100,00%	DAU, DAK Bidang Pendidikan-SKB, DID-Bidang Pendidikan, PAD,
		6	Pembangunan sarana dan prasarana bermain	831.600.000	829.903.600	99,80%	100,00%	99,90%	DAK Bidang Pendidikan-SKB,
		7	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	1.570.781.828	1.570.781.828	100,00%	100,00%	100,00%	BHP Prov PKB, DAU,DAK Bidang Pendidikan-SKB, DID-Bidang Pendidikan,
		8	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	240.000.000	233.198.266	97,17%	100,00%	98,58%	DAK Bidang Pendidikan-SKB,
		9	Pengadaan mebeluer sekolah	170.400.000	170.400.000	100,00%	100,00%	100,00%	DAK Bidang Pendidikan-SKB,
		10	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	1.915.704.000	1.915.356.280	99,98%	100,00%	99,99%	BHP Prov BBNKB,DAU, DAK Bidang Pendidikan-SKB, DID-Bidang Pendidikan,



		11	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Anak Usia Dini	41.080.000	40.552.000	98,71%	100,00%	99,36%	BHP Prov BBNKB, DAU, DID-Bidang Pendidikan,
		12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana PAUD	152.290.000	152.242.266	99,97%	100,00%	99,98%	BHP Prov BBNKB, DAK Bidang Pendidikan-SKB,
		13	Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	1.473.874.000	1.099.431.640	74,59%	100,00%	87,30%	BHP Prov PKB, DAU DAK Non Fisik BOP PAUD, DID-Bidang Pendidikan,
<b>% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Kegiatan</b>				<b>7.244.607.000</b>	<b>6.860.743.052</b>	<b>94,70%</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,35%</b>	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan SD / MI</b>	14	Pengembangan data dan informasi pendidikan dasar	27.201.400	27.166.600	99,87%	100,00%	99,94%	BHP Prov PKB, DAU, DID-Bidang Pendidikan,
		15	Penambahan Ruang Guru Sekolah SD	938.375.000	934.500.000	99,59%	100,00%	99,79%	DAK Bidang Pendidikan-SD,
		16	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD	234.550.000	234.550.000	100,00%	100,00%	100,00%	DAK Bidang Pendidikan-SD,
		17	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD/MI	1.117.350.000	1.110.500.000	99,39%	100,00%	99,69%	DAK Bidang Pendidikan-SD,
		18	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SD	665.350.000	660.500.000	99,27%	100,00%	99,64%	DAK Bidang Pendidikan-SD,
		19	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SD/MI	802.800.000	801.685.743	99,86%	100,00%	99,93%	BHP Prov PKB, DAK Bidang Pendidikan-SD,
		20	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD/MI	1.942.520.000	1.900.055.640	97,81%	100,00%	98,91%	DAK Bidang Pendidikan-SD,
		21	Pengadaan Mebeluer Sekolah SD/MI	570.600.000	570.140.000	99,92%	100,00%	99,96%	DAU, DAK Bidang Pendidikan-SD,
		22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD/MI	2.156.515.242,83	2.150.381.132,83	99,72%	100,00%	99,86%	BHP Prov PKB, DAU, DAK Bidang Pendidikan-SD, PAD,
		23	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	160.215.457,17	158.128.680	98,70%	100,00%	99,35%	DAU, DAK Bidang Pendidikan-SD, PAD
		24	Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI/SDLB	971.900.000	968.216.054	99,62%	100,00%	99,81%	BHP Prov PKB, DAK Bidang Pendidikan-SD,
		25	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB serta Pesantren	64.369.956.334,08	62.531.108.334,89	97,14%	100,00%	98,57%	BHP Prov PKB, DAU, DID-Bidang Pendidikan, BOS, SILPA BOS,

			Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD						
		26	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar (SD)	5.484.000	5.460.400	99,57%	100,00%	99,78%	PAD,
		27	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD/MI	44.930.620	44.910.288	99,95%	100,00%	99,98%	PAD,
		28	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SD	45.094.900	45.049.800	99,90%	100,00%	99,95%	BHP Prov PKB, DAU, DID-Bidang Pendidikan, PAD,
		29	Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu (SD/MI)	1.276.517.200	1.266.856.940	99,24%	100,00%	99,62%	BHP Prov BBNKB, PAD,
<b>% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Kegiatan</b>				<b>75.329.360.154,08</b>	<b>73.409.209.612,72</b>	<b>97,45%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,67%</b>	
4	<b>Program Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan SMP/MTS</b>	30	Pengadaan Mebeluer Sekolah SMP/MTs	254.700.000	254.700.000	100,00%	100,00%	100,00%	DAK Bidang Pendidikan-SMP,
		31	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP/MTs	2.683.096.400	2.682.758.366	99,99%	100,00%	99,99%	DAK Bidang Pendidikan-SMP,PAD,
		32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah SMP	775.000.000	775.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	DAK Bidang Pendidikan-SMP,
		33	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan praktikum sekolah SMP/MTs	1.342.240.000	1.342.240.000	100,00%	100,00%	100,00%	DAK Bidang Pendidikan-SMP,
		34	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	298.892.000	293.064.800,00	98,05%	100,00%	99,03%	BHP Prov PKB, DAU, DID-Bidang Pendidikan, PAD,
		35	Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTs/SMPLB	1.037.690.800	1.037.677.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	DAK Bidang Pendidikan-SMP, PAD,
		36	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	38.233.634.715,15	37.843.303.095,66	98,98%	100,00%	99,49%	BHP Prov BBNKB,DAU, DID-Bidang Pendidikan, BOS,SiLPA BOS,
		37	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP/MTs	5.718.550	5.368.550	93,88%	100,00%	96,94%	PAD,
		38	Penyediaan Beasiswa Retrievel Untuk Anak Putus	858.162.500	843.185.550	98,25%	100,00%	99,13%	PAD,

			Sekolah SMP/MTs						
		39	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk SMP/MTs	329.296.000	328.059.120,00	99,62%	100,00%	99,81%	BHP Prov BBNKB, DAU, DAK Bidang Pendidikan-SMP, DID-Bidang Pendidikan,
		40	Pembangunan Ruang Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah SMP/MTs	2.480.238.400	2.480.238.400,00	100,00%	100,00%	100,00%	DAK Bidang Pendidikan-SMP,
		41	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP/MTs	100.000.000	98.037.690,51	98,04%	100,00%	99,02%	BHP Prov BBNKB,
		42	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SMP/MTs	226.000.000	224.576.322,00	99,37%	100,00%	99,69%	DAK Bidang Pendidikan-SMP, PAD,
		43	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa SMP/MTs	2.098.892.800	1.976.546.988,00	94,17%	100,00%	97,09%	DAK Bidang Pendidikan-SMP, PAD,
		44	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP	569.204.600	569.204.600,00	100,00%	100,00%	100,00%	DAK Bidang Pendidikan-SMP,
		45	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	1.527.680.000	1.527.680.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	DAK Bidang Pendidikan-SMP,
		46	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SMP	299.940.000	299.940.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	DAK Bidang Pendidikan-SMP,
		47	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	404.600.000	404.600.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	DAK Bidang Pendidikan-SMP,
<b>% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Kegiatan</b>				<b>53.524.986.765,15</b>	<b>52.986.180.482,17</b>	<b>98,99%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,45%</b>	
5	Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan	48	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	86.028.700	85.758.950,00	99,69%	100,00%	99,84%	BHP Prov PKB, DAU, DID-Bidang Pendidikan,
		49	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	1.150.000	1.149.800,00	99,98%	100,00%	99,99%	PAD,
		50	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik SD	11.784.400	11.645.810,00	98,82%	100,00%	99,41%	BHP Prov BBNKB,
		51	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	17.866.492.000	17.838.635.790,00	99,84%	100,00%	99,92%	BHP Prov PKB, BHP Prov BBNKB, DAU, DID-Bidang Pendidikan, PAD,
		52	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik GTK	8.988.700	8.910.726,00	99,13%	100,00%	99,57%	PAD,

			PAUD/PNF						
		53	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan GTK PAUD/PNF	3.120.014.600	3.113.661.648,00	99,80%	100,00%	99,90%	BHP Prov PKB, BHP Prov BBNKB, DAU, DID-Bidang Pendidikan, PAD,
		54	Pelatihan Bagi Pendidik SD untuk memenuhi standar Kompetensi	1.250.000	1.250.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	BHP Prov PKB, DAU,
		55	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik SMP	16.926.500	16.705.832,00	98,70%	100,00%	99,35%	BHP Prov BBNKB,
		56	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan GTK SMP	8.283.394.800	8.273.257.716,00	99,88%	100,00%	99,94%	BHP Prov PKB, BHP Prov BBNKB, DAU, DID-Bidang Pendidikan, PAD,
<b>% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Kegiatan</b>				<b>29.396.029.700,00</b>	<b>29.350.976.272,00</b>	<b>99,85%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,77%</b>	
<b>Total Jumlah % Pencapaian Rencana Tingkat Kegiatan :</b>				<b>166.745.596.619,23</b>	<b>163.772.436.773,89</b>	<b>98,22%</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,63%</b>	

### 3.2 Bidang Kesehatan.

#### PROGRAM DAN KEGIATAN

Indikator – indikator SPM diidentifikasi dan didistribusikan pada bidang yang menangani program dan kegiatan yang sesuai dengan indikator SPM. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Indikator SPM yang terkait dengan Program dan Kegiatan

No.	Indikator SPM	Program	Kegiatan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Upaya Kesehatan Keluarga	Peningkatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Pelayanan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Kesehatan Ibu dan Bayi
4	Pelayanan Kesehatan Balita		Peningkatan Pelayanan

			Kesehatan Balita
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Program Upaya Kesehatan Keluarga	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
8	Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
9	Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Militus		
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Pelayanan Kesehatan Jiwa
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	1. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV		2. Peningkatan komunikasi, informasi dan

			edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit
--	--	--	--------------------------------------------------------

#### 4.1 Kesimpulan

1. Dari 12 indikator SPM Bidang Kesehatan baru 6 indikator yang mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada PMK Nomor 4 Tahun 2019 yaitu :
2. Tiga Indikator capaiannya sudah di atas 70%, yaitu :
  - Pelayanan kesehatan balita
  - Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes militus
  - Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
3. Tiga indikator masih sangat rendah capaiannya (< 60%), yaitu :
  - Pelayanan Kesehatan usia produktif
  - Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi
  - Pelayanan Kesehatan orang dengan TB
  -

#### 4.2 Saran

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelayanan Standar Pelayanan Minimal di Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan menentukan langkah perbaikan sehingga pelayanan terus dapat ditingkatkan. Selain perbaikan pelayanan perlu juga dilakukan peningkatan upaya – upaya dan inovasi – inovasi baru untuk pencapaian target SPM Bidang Kesehatan, dan akhir kata kami ucapkan terimakasih.

### 3.3 Bidang Pekerjaan Umum.

#### PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng, terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang dilakukan yaitu :

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target 2020	Pagu 2020
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		
a	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Tersedianya sarana dan prasarana Air Limbah	90%	2.635.116.000,00
b	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah	100%	147.945.000,00
c	Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum	Tersedianya perencanaan SPAM	100%	206.830.000,00
d	Pendampingan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan SPAM yang sesuai standar	100%	120.728.000,00
e	Pendampingan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum	Pengelolaan SPAM yang sehat dan mandiri	100%	12.825.000,00
2	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		
a	Peningkatan cakupan sistem penyediaan air minum	Tersedianya sarana dan prasarana air minum perdesaan	92%	638.032.075,00

### 3.4 Bidang Perumahan Rakyat.

#### PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program dan kegiatan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2020 adalah :

No.	TARGET					REALISASI	KET.
	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME (UNIT)	SUMBER DANA	PAGU (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL	PENDAMPINGAN DAN STIMULASI REHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA ALAM	82	APBD	650.000.000	-	BANTUAN SOSIAL BENTUK UANG
		Kec. Seririt	31		222.200.000		
		1. Desa Pangkung Paruk	9		63.200.000		
		2. Desa Banjarasem	22		159.000.000		
		Kecamatan Kubutambahan	2		16.000.000		
		1. Desa Tamblang	2		16.000.000		
		Kecamatan Grogkak	22		193.600.000		
		1. Desa Tukad Sumaga	11		84.700.000		
		2. Desa Sanggalangit	11		108.900.000		
		Kecamatan Sukasada	15		111.000.000		
		1. Desa Silangjana	15		111.000.000		
		Kecamatan Banjar	12		107.200.000		
		1. Desa Tampekan	3		29.700.000		
		2. Desa Banjar	9		77.500.000		



### **3.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.**

3.5.1.1.1.1.1 Program dan Kegiatan Satuan Polis Pamong Praja Tahun 2020 di bidang teknis dibagi menjadi 3 Program dan 3 Kegiatan yaitu :

- ❖ Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan terdiri dari 1 Kegiatan yaitu :
  - Kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- ❖ Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal terdiri dari 1 Kegiatan yaitu :
  - Kegiatan penegakan peraturan daerah / peraturan kepala daerah
- ❖ Program Koordinasi ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 Kegiatan yaitu :
  - Kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja

3.5.1.1.1.1.2 Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2020 di bidang teknis dibagi menjadi 3 Program dan 7 Kegiatan yaitu :

- ❖ Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran terdiri dari 1 Kegiatan yaitu :
  - Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- ❖ Program Pencegahan Kebakaran terdiri dari 3 Kegiatan yaitu :
  - Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
  - Kegiatan Pelatihan dan Simulasi Bahaya Kebakaran
  - Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Bahaya Kebakaran
  - Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana Bahaya Kebakaran
- ❖ Program Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran terdiri dari 2 Kegiatan yaitu :
  - Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran
  - Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran.

### **.1.1.3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan  
Bencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana  
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan  
Kesiapsiagaan

Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi  
Korban Bencana Kabupaten/Kota

Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam  
Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

## 6. Bidang Sosial.

Program dan kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang urusan sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2020.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU DANA ( Rp )	REALISASI KEUANGAN ( Rp )	REALISASI FISIK ( % )
<b>Belanja Langsung</b>					
1.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada lansia luar panti	147.773.300	147.019.450	100
2	Program Pembinaan anak terlantar	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	96.064.900	95.678.650	100
3	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks. Nartapidna, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	92.032.800	91.402.450	100
4.	Program pembinaan para penyandang penyakit disabilitas dan trauma	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma	30.316.000	30.183.500	100
		Pendayagunaan para penyandang disabilitas dan eks trauma	192.210.000	191.305.000	100
5.	Program perlindungan dan jaminan sosial	Penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	341.717.000	337.306.190	98,71
<b>Belanja Tidak Langsung</b>					
1.	Program Semesta Berencana	Lanjut Usia Luar panti	100.000.000	100.000.000	100
	<b>Total</b>		1.000.114.000	992.895.240	

## **BAB. IV**

### **PENUTUP**

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada SKPD terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu persyaratan agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Buleleng Tahun 2020 ini dibuat dan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan prima yang kita harapkan dapat terwujud.

**B. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMAAN LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.**

**1. PENDIDIKAN.**

<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator Pencapaian</b>	<b>Target Capaian</b>	<b>Batas Waktu Capaian</b>
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	SD :100.5% SMP:98.12%	Tahun 2020
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasra atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Tahun 2020
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	31.8%	Tahun 2020

## 2. KESEHATAN.

No.	Jenis Pelayanan SPM Kabupaten / Kota	Standar Pelayanan Minimal	
			Target
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Kesehatan dan Gizi	Keluarga 100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Kesehatan dan Gizi	Keluarga 100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kesehatan dan Gizi	Keluarga 100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Kesehatan dan Gizi	Keluarga 100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Kesehatan dan Gizi	Keluarga 100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	dan Tidak 100%
7	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	dan Tidak 100%
8	Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	dan Tidak 100%
9	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	dan Tidak 100%
10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.	Kesehatan dan Gizi	Keluarga 100%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	dan 100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	dan 100%

### 3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Tahun 2020
2	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase layanan air minum perpipaan kabupaten	90%	Tahun 2020

### 4. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Volume Pencapaian
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	1 Januari s/d 31 Desember 2020
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Volume Pencapaian
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban dan terdampak Kebakaran di Kabupaten tahun 2020. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. $\frac{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran}}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran}} \times 100\%$	100%	1 Januari s/d 31 Desember 2020

Jumlah Layanan Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun 2020 dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng

$$\begin{aligned}
 \text{RUMUS} &= \frac{\text{jumlah Kejadian di Kabupaten Buleleng}}{\text{jumlah Layanan Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun 2020 dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng}} \times 100\% \\
 &= \frac{0}{133} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$

## 6. SOSIAL.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	78,26%	Tahun 2020
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Tahun 2020
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Tahun 2020
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Tahun 2020
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Tahun 2020



